

## Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial

Arfiansyah 

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda  
Aceh, Indonesia

Korespondensi: [arfiansyah@acehresearch.org](mailto:arfiansyah@acehresearch.org)

### INFO ARTIKEL

#### **Info Publikasi:**

Artikel Hasi Penelitian

#### **Sitasi Cantuman:**

Arfiansyah. (2020). Islam dan Budaya Masyarakat Gayo: Kajian Sejarah dan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), 1-31.

**Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh JSAI**

**Dikirim:** 2 Maret 2020

**Diterima:** 20 Maret 2020

**Dipublikasi:** 31 Maret 2020

### ABSTRACT

*This article argues that Gayonese community practice Islam through the culture and less concern with religious texts. Although the wave of islamization since the colonial time and post-independence was high, the process does not succeed in introducing what the local scholars called as Islamic tradition. Such situation forces the following ulama to defend culture by finding justification for every practice instead of abolishing it. There are two factors leading to the situation. First, ulama of colonial and post-colonial time did not succeed in finding what they called as Islamic tradition replacing the existing tradition. second, lacking of regeneration of reformer Ulama that drive the living reformer ulama to support culture by inserting Islamic values and norms into the culture. This effort is crucial as the Gayonese refers more to the culture than the religious texts. This Article historically studies the development of Islam in Gayonese community. It frames its historical analysis from the Dutch colonial period to post independence of Indonesia Republic. It generally observes the impact of islamization in the past to the current situation. This article brings back the fundamental question in socio-anthropological studies about Islam that why do Muslim who refer to same source of text understand and practice Islam in widely various expression. The question is applied to this research exploring the development of Islam in Gayonese community inhabiting Central Aceh and Bener Meriah District. Thus, this research questions how did Islam develop in colonial time and its impact to the local culture? did there a debate about religion and culture take place during the colonial time and post-independence of Indonesia? How does the past event affect the current practice of Islam in Gayonese community? the questions are explored historically by collecting relevant literatures and collective memory of the local people. The collective memory data were collected from 2015 to 2019.*

**Keywords:** Islam, Culture, and Ulama

## Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang sejarah perkembangan Islam dan dampaknya terhadap kehidupan budaya dan sosial pada masyarakat Gayo. Penelitian ini membatasi waktu sejarah pada masa kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan Indonesia dan secara umum mengkaji dampak masa lalu islamisasi budaya terhadap hari ini. Penelitian mencoba menanyakan kembali pertanyaan sosio-antropologis tentang mengapa umat agama Islam yang merujuk pada satu teks yang sama memiliki praktik dan pemahaman yang begitu beragam. Pertanyaan tersebut diuraikan kembali dalam kajian tentang perkembangan Islam masyarakat Gayo yang mendiami wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah. Uraian pertanyaan besar tersebut adalah bagaimana proses perkembangan Islam pada masa kolonial dan dampaknya terhadap adat/budaya dan kehidupan sosial? Bagaimana berdebatan dan persilihan pemahaman keagamaan dan budaya pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Bagaimana kejadian masa lalu mempengaruhi praktik Islam saat ini pada masyarakat Gayo? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dieksplorasi dengan menggunakan kajian historis dan *collective memory* dengan pendekatan oral histori masyarakat setempat. Data penelitian *collective memory* dilakukan semenjak tahun 2015 dan 2019. Penelitian ini berpandangan bahwa masyarakat Gayo mempraktikkan Islam melalui budaya dan kurang fokus pada studi teks-teks agama. Meski gelombang islamisasi pada masa kolonial dan pasca kemerdekaan tinggi, namun proses itu tidak berhasil memperkenalkan budaya islami. Sehingga, para ulama dikemudian hari memilih untuk menemukan ajaran-ajaran Islam yang mendukung praktik adat daripada mengubahnya praktik tersebut. Ada dua faktor yang mengakibatkan pilihan ulama kemudian hari untuk membela adat budaya. Pertama adalah para ulama Gayo terdahulu tidak berhasil menemukan budaya baru yang mereka sebut sebagai budaya islami untuk menggantikan adat dan budaya yang dipraktikkan pada masa itu. Kedua adalah putusnya regenerasi ulama pembaharu. Sehingga ulama-ulama kemudian memilih untuk mencari justifikasi dari teks-teks agama untuk mendukung praktik adat. Proses ini penting sebagai jalan masyarakat Gayo mengamalkan ajaran Islam ketika ulama pembaharuan tidak mendapatkan penerusnya.

**Kata kunci:** Islam, Adat, Ulama

\*\*\*

### A. Pendahuluan

Selama ini, kajian-kajian tentang Islam dan budaya di provinsi Aceh sering difokuskan pada masyarakat pesisir yang secara dominan di huni oleh suku etnis Aceh. Hal ini karena, sepertinya, selain sebagai etnis Aceh mendominasi dinamika perpolitikan, pemerintahan dan perdagangan di provinsi Aceh, mereka juga menyimpan banyak literatur klasik dan modern yang membantu para peneliti dalam melakukan sebuah kajian. Dengan dua kelebihan tersebut, masyarakat pesisir Aceh menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak peneliti dari dalam maupun dari luar negeri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya Eka Srimulyani, "Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (2010): 321-342, doi:10.14421/ajis.2010.482.321-342; R. Michael Feener, *Shari'ah and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*, Oxford Islamic Legal Studies 375521917 (Oxford; New York: Oxford University Press, 2013); David Kloos,

Islam kerap menjadi titik sentral studi-studi para sarjana tersebut untuk mempelajari masyarakat etnis Aceh. Studi keislaman mereka kemudian mencakup sejarah, budaya, politik, hukum, gender, dan seksualitas.<sup>2</sup> Dengan melakukan kajian terhadap kelompok dominan, barangkali penelitian-penelitian yang tersebut diharapkan dapat menggambarkan keadaan seluruh provinsi yang dihuni oleh lebih dari 13 suku bangsa yang menuturkan 11 bahasa yang berbeda.<sup>3</sup> Kajian tersebut kemudian membuat Aceh yang beragam menjadi satu wajah yang tunggal.

Masyarakat Gayo adalah etnis terbesar kedua di Provinsi Aceh setelah etnis Aceh. Mereka mendiami wilayah tengah hingga tenggara provinsi Aceh. Berdasarkan hasil temuan penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Ketut Wiradnyana, masyarakat Gayo adalah etnis pertama yang mendiami provinsi Aceh dan diduga juga merupakan nenek moyang suku batak.<sup>4</sup> Meskipun dianggap sebagai etnis tua, belum banyak kajian tentang perkembangan Islam dan budaya terhadap masyarakat tersebut. Kajian-kajian tentang Gayo selama dua dekade terakhir berfokus pada bahasa,<sup>5</sup> budaya seperti arsitektur

---

*Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018); David Kloos, "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia," *Indonesia*, no. 98 (1 Oktober 2014): 59–90, doi:10.5728/indonesia.98.0059.

<sup>2</sup> Lihat misalnya Syahrizal Abbas dan Syamsul Rijal, *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2007); Syahrizal Abbas, Syamsul Rijal, dan Bustami Abubakar, "Respon Masyarakat Bireun Terhadap Hukuman Cambuk," dalam *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2007); Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008); Taufik Adnan Amal, *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*, Cet. 1.. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004); Husda Husaini, "Sejarah Pemberlakuan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," dalam *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, ed. oleh Fauzi Ismail dan Arifin M. Zain (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007); Abidin Nurdin, Samsul Bahri, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dinas Syariat Islam, *Syariat Islam dan isu-isu kontemporer*, Ed. 1.. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011); Arskal Salim, "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (1 Januari 2010): 1–29, doi:10.1080/07329113.2010.10756640; Dina Afrianty, "Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI," dalam *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, ed. oleh David Kloos, Annemarie Samuels, dan R. Michael Feener (Leiden: BRILL, 2015); Edward Aspinall, "From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia," *Nations and Nationalism* 13, no. 2 (2007): 245–263, doi:10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x.

<sup>3</sup> nurdin, "Provinsi Aceh Terdiri Dari 23 Kabupaten, 13 Suku Dan Memiliki 11 Bahasa," *Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh*, 30 Oktober 2019, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/>.

<sup>4</sup> Ketut Wiradnyana, *Gayo merangkai identitas*, Ed. 1.. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

<sup>5</sup> Dardanila Dardanila, "Leksikostatistik Bahasa Karo dan Bahasa Gayo," dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. 1, 2018, 185–191; Rismawati Rismawati, "Tingkat Keterancaman dan Kepunahan Bahasa Gayo," *Metamorfosa Journal* 4, no. 2 (2016); Muhammad Surip dan Dwi Widayati, "Kekerabatan Bahasa Jawa dan Gayo: Kajian Linguistik Historis Komparatif," *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 11, no. 1 (2019): 1–26.

rumah adat<sup>6</sup> dan bangunan,<sup>7</sup> pengaruh Islam pada praktik budaya tertentu atau mengkaji norma tertentu<sup>8</sup> dan hubungannya dengan pembangunan negara.<sup>9</sup> Belum ada, dalam dua dekade terakhir, yang mengkaji tentang perkembangan dan perdebatan Islam dan budaya di kawasan tersebut.

Sejauh ini, penulis hanya menemukan dua sarjana yang mengkaji tentang dinamika Islam pada masyarakat Gayo. Mereka adalah John R Bowen dan Mukhlis PaEni. Keduanya melakukan penelitian pada dekade yang sama di tahun 1980an. Bowen melihat Gayo dari daerah Isak dengan metode etnografis sedangkan Mukhlis PaEni melakukan penelitian sosiologis di kecamatan Kebayakan dan sekitarnya. Bowen<sup>10</sup> menggambarkan bagaimana masyarakat Gayo mengadaptasikan Islam dalam budaya mereka. Islam dielaborasi lebih jauh ke dalam tradisi-tradisi lokal seperti pengobatan dan perdukunan. Mereka juga mengonstruksi pengetahuan-pengetahuan metafisik dengan mengambil sumber-sumber dari Islam.<sup>11</sup>

Sedangkan studi yang dilakukan oleh PaEni berfokus pada gerakan-gerakan pembaharuan Islam di Gayo.<sup>12</sup> Dalam kajian tersebut, dia mengklasifikasi ulama ke dalam ulama birokrat dan ulama rakyat. Ulama birokrat adalah ulama-ulama yang berafiliasi dengan pemerintahan atau menjadi bagian dari elit politik lokal. Sedangkan ulama rakyat adalah ulama-ulama yang tidak terikat pada kepentingan pemerintahan dan politik. Dua kategori ini memberikan implikasi yang berbeda. Ulama birokrat cenderung diam dan tidak mau mengkritisi pemerintah. Mereka terikat oleh kepentingan-kepentingan pemerintahan dan politik. Sedangkan ulama rakyat terbebas dari kedua kepentingan tersebut. Sehingga mereka menjadi corong masyarakat untuk mengkritisi pemerintah.

Penelitian ini mengupdate studi yang dilakukan oleh Bowen dan PaEni tentang perkembangan Islam yang mempengaruhi perubahan budaya Gayo. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan teoretis dalam studi sosial antropologi masyarakat muslim, bagaimana agama (Islam) yang bersumber dari satu ajaran (teks/Alquran) dipraktiknya dengan wajah yang beragam di seluruh dunia? Para sarjana mengeksplorasi beragam objek penelitian untuk menjawab pertanyaan sosiologis antropologi tersebut. Mulai dari

---

<sup>6</sup> Ansar Salihin, Sulaiman Juned, dan Dharsono Dharsono, "Motif ukiran Kerawang Gayo pada Rumah Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh," *Gorga Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): 68–79.

<sup>7</sup> Kamsin Kamsin, "Rancangan kawasan pusat seni budaya Gayo di Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

<sup>8</sup> Syukri Syukri, "Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 406–27.

<sup>9</sup> Syukri, *Sarakopat: sistem pemerintahan Tanah Gayo dan relevansi terhadap pelaksanaan otonomi daerah* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006).

<sup>10</sup> John R. Bowen, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Mukhlis PaEni, *Riak di laut tawar: kelanjutan tradisi dalam perubahan sosial di Gayo-Aceh Tengah*, Cet. 1.. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2003).

perempuan, hukum, ritual, sufisme, hingga filsafat.<sup>13</sup> Studi-studi tersebut memberikan sebuah benang merah bahwa wajah Islam bergantung pada proses asimilasi yang berproses semenjak penyebaran Islam pertama sekali sampai ke daerah-daerah yang jauh dari Timur Tengah. Proses ini terus terjadi hingga saat ini yang kemudian mempengaruhi bentuk keber-islam-an sebuah kelompok masyarakat.

Berangkat dari pandangan besar di atas, penelitian ini mengkaji tentang perkembangan Islam pada masa kolonial dan dampaknya terhadap adat, perdebatan-perdebatan pemikiran keagamaan, dan pembaharuan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini secara sekilas juga mengkaji perkembangan umum tentang Islam di Gayo hari ini. Penelitian ini menyimpulkan beragam kajian Bowen dan PaEni, serta diperkaya dengan data-data yang dikumpulkan melalui kajian sejarah, sejarah lisan dan *collective memory*,<sup>14</sup> yang dilakukan semenjak tahun 2015 hingga tahun 2019.

Artikel ini dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama adalah sejarah perkembangan masyarakat Gayo untuk memperkenalkan objek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan Islam dan adat masa kolonial dan dampaknya terhadap adat yang diklasifikasi ke dalam 5 kategori. Bagian ini juga membahas tentang perdebatan agama antar kelompok tradisional dan modernis dan dampaknya terhadap masyarakat saat itu hingga pasca era reformasi Indonesia. Bagian terakhir adalah reformasi adat pasca kemerdekaan.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Sejarah Perkembangan Masyarakat Gayo

Gayo muncul pertama kali di dalam literatur melayu Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat tersebut memuat tentang cerita-cerita raja Aceh semenjak tahun 1280 hingga

---

<sup>13</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016); Kilian Bälz, "Shari'a and Qanun in Egyptian Law: A Systems Theory Approach to Legal Pluralism," *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online* 2, no. 1 (1995): 37-53, Benda-Beckmann dan Keebet Von Benda-Beckmann, "Decentralisation, the transformation of the nagari and the dynamics of legal pluralism" (Cambridge: Cambridge University Press, 2013); Maurits S Berger, "The Shari'a and Legal Pluralism: The Example of Syria," dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. oleh Baudouin Dupret, M. S. Berger, dan Laila Al- Zwaini, (The Hague [etc.]: Kluwer Law International, 1999); Bowen, *Muslims through Discourse*; Husayn Naṣr, *Ideals and Realities of Islam* (London [etc.]: Aquarian, 1994); Husayn Naṣr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2002).

<sup>14</sup> *Collective Memory* adalah metode yang mengali ingatan-ingatan kolektif tentang masa tertentu. Terdapat perbedaan pendapat tentang *collective memory*, namun secara garis besar para sarjana bersepakat bahwa *collective memory* adalah ingatan-ingatan yang hidup tentang suatu kejadian tertentu di masa tertentu. Dia adalah mekanisme kognitif yang dimiliki oleh makhluk rasional yang dapat menjelaskan bagaimana seseorang memberikan konsep persepsi pribadinya tentang objek eksternal. *Collective memory* ini akan memberikan gambaran konkret tentang sebuah masyarakat melewati atau bertentangan dengan gambaran pribadi. Tentunya saja dalam prosesnya, pertentangan pandangan pribadi dan umum itu dapat terjadi melalui proses pengumpulan memori yang terus menerus, yang juga berfungsi sebagai verifikasi memori. Yigal Elam dan Noa Gedi, "Collective Memory - What Is It?," *History and Memory* 8, no. 1 (1 April 1996): 30-50; Paolo Jedlowski, "Memory and Sociology: Theme and Issues," *Time and Society* 10, no. 1 (2001): 29-40.

1400. Menurut Hikayat tersebut, terdapat sebuah kelompok yang menolak untuk diislamkan oleh utusan dari Mekkah. Kelompok tersebut kemudian lari mengikuti arus Sungai Peusangan ke hulu dan kemudian disebut dengan Gayo.<sup>15</sup> Kata "Gayo" diyakini sebagai modifikasi kata dari etnis Aceh yang berasal dari kata "ka yo" yang berarti takut. Orang Gayo adalah sebuah kelompok yang takut untuk masuk Islam dan kemudian lari ke dataran tinggi. Mereka menjadi muslim di kemudian hari. Gayo juga disebutkan dalam Hikayat Aceh, literatur melayu lainnya yang ditulis nyaris berdekatan dengan masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada abad ke 17. Literatur tersebut menyebutkan bahwa masyarakat Gayo telah mengenal Sultan dan menjadi muslim sebelum kedatangan Sultan ke daerah tersebut.<sup>16</sup>

Dari sudut kebahasaan, menurut Dyen (1965), bahasa etnis Aceh adalah sub-famili langsung dari Melayu dan bagian dari populasi daratan utama Aceh Tenggara. Sedangkan Bahasa Gayo, menurutnya, dipengaruhi oleh Javo-Sumatran Hension dan Malayic Hension. Hension adalah sub-famili dari sub famili melayu. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa bahasa Gayo lebih muda daripada bahasa Aceh yang merupakan sub famili langsung dari populasi melayu di wilayah utama Asia Tenggara. Dyen juga menduga bahwa Bahasa Batak dipengaruhi oleh dan kemungkinan berasal dari Bahasa Gayo dan Sundic Hension.<sup>17</sup>

Menurut Melalatoa, merujuk pada Kridaleksana (1962), Bahasa Aceh dan Bahasa Gayo berpisah pada tahun 1515 sebelum Masehi. Margin kesalahan dari penanggalan ini adalah 340 tahun. Sementara Bahasa Gayo dan Bahasa Batak berpisah lebih awal pada tahun 609 sebelum Masehi. Dengan analisa linguistik ini, Melalatoa menolak pandangan bahwa dataran tinggi baru saja dihuni oleh kelompok yang kemudian dikenal sebagai Etnis Gayo karena mereka melarikan diri ke wilayah tersebut.<sup>18</sup> Dengan merujuk pada Shorto, Bowen mengatakan bahwa Bahasa Aceh dan Bahasa Gayo memiliki kata serapan dari keluarga bahasa Mon-Khmer. Kata-kata serapan tersebut menunjukkan akan adanya interaksi manusia melalui pergerakan manusia, seperti melalui berdagang, di sepanjang selat malaka dengan penutur bahasa Mon-Khmer di wilayah barat Melayu. Terlebih, kata-kata serapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Gayo masa lalu pernah menetap di wilayah pantai utara Aceh.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Russell Jones, *Hikayat Raja Pasai*, Karya agung 303741295 (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan: Fajar Bakti, 1999), 15-17.

<sup>16</sup> John R. Bowen, *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989* (New Haven, Conn, etc: Yale University Press, 1991), 15.

<sup>17</sup> Isidore Dyen, *A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages*, Memoir of International Journal of American Linguistics; Memoir 19 851547273 (Baltimore, Md.: Waverly Press, 1965), 26.

<sup>18</sup> M. J. Melalatoa, *Kebudayaan Gayo* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 38.

<sup>19</sup> John R. Bowen, "The History and Structure of Gayo Society: Variation and Change in the Highland of Aceh" (ProQuest Dissertations Publishing, 1984), 48, <http://search.proquest.com/docview/252106428/>.

Penelitian arkeologis terbaru di Aceh Tengah memberikan penjelasan lebih detail tentang ke-pribumi-an masyarakat Gayo sebagai penghuni pertama provinsi Aceh dan pulau Sumatra secara umum. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2009-2016 menemukan bahwa Provinsi Aceh dihuni pertama sekali oleh imigran yang membawa budaya hoabin dari periode Mesolitik. Budaya pada masa itu ditandai dengan capaian penemuan metode berburu dengan ragam teknologi yang terbuat dari batu, seperti kapak batu dengan beragam bentuk. Teknologi ini pertama sekali dikembangkan di Vietnam sekitar 1580 sebelum Masehi.<sup>20</sup> Penelitian arkeologis ini mengindikasikan bahwa masyarakat pendatang yang tinggal di Gayo adalah masyarakat asli provinsi Aceh. Ketut Wiradnyana, ketua penelitian tersebut, berpendapat bahwa pendatang tersebut adalah nenek moyang seluruh masyarakat Gayo dan kemungkinan juga merupakan nenek moyang orang Batak di Sumatera Utara.<sup>21</sup>

Sebelum kolonialisme, masyarakat Gayo adalah bagian dari kesultanan Aceh. Awalnya, ada empat kerajaan di Gayo; Linge, Bukit, Petiamang, dan Syiah Utama. Otoritas kerajaan-kerajaan terbatas pada penyelesaian perselisihan antara penguasa-penguasa yang lebih rendah, penganugerahan penghargaan dan kekuasaan kepada kekerabatan/klan baru beserta penguasa wilayah kecil. Otoritas-otoritas para raja tersebut juga berhubungan dengan urusan eksternal seperti berdiplomasi dengan kekuatan-kekuatan di luar wilayah kekuasaannya seperti kesultanan Aceh dan penjajah Belanda. Mereka bergabung pada perang Aceh pada akhir-akhir peperangan Aceh-Belanda pada tahun 1901, ketika Belanda mulai menginvasi wilayah tengah untuk mencari Sultan yang melarikan diri. Namun, beberapa individu yang tidak mengatasnamakan kerajaan telah lebih dahulu ikut berperang melawan Belanda semenjak tahun 1870an.<sup>22</sup>

Di bawah kekuasaan Belanda, penguasaan Cik Bebesen diberikan kekuasaan setingkat empat kerajaan lainnya yang telah disebutkan. Sebelumnya, Cik Bebesen adalah komunitas masyarakat kecil yang tunduk dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bukit. Penghargaan setingkat empat kerajaan lainnya merupakan penghargaan atas bantuan mereka terhadap Belanda. Strategi “pecah belah” yang dilakukan Belanda tersebut masih berdampak hingga saat ini. Masyarakat Gayo saat ini dibagi ke dalam dua kelompok budaya besar. Linge, Syiah Utama, dan Bukit menyatu ke dalam budaya Kerajaan Bukit.<sup>23</sup> Mereka juga dikenal dengan Gayo Lot/Uken, yang berarti kelompok

---

<sup>20</sup> Wiradnyana, *Gayo merangkai identitas*, 85-90.

<sup>21</sup> Lintasgayo.co, “Berkunjung ke Situs Loyang Mendale, Dr. Ketut Jelaskan Objek Penelitian ke Pak Nas,” *Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, 27 Maret 2017, <http://lintasgayo.co/2017/03/27/berkunjung-ke-situs-loyang-mendale-dr-ketut-jelaskan-objek-penelitian-ke-pak-nas>.

<sup>22</sup> Bowen, “THE HISTORY AND STRUCTURE OF GAYO SOCIETY,” 52-61; C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan penduduknya*, Seri INIS; XXV (Jakarta: INIS, 1996), 87.

<sup>23</sup> Bowen, “THE HISTORY AND STRUCTURE OF GAYO SOCIETY,” 52-61; Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan penduduknya*, 87.

budaya yang mendominasi wilayah hulu air. Sedangkan masyarakat Cik Bebesen dikenal saat ini dengan sebutan Gayo Toa yang mengisyaratkan geografis wilayah hunian mereka di sekitar hilir atau sungai Peusangan yang mengalir dari danau ke pantai utara Aceh.

Pasca Kemerdekaan Indonesia, kedua budaya besar di Gayo: Lot dan Toa bersama dengan masyarakat Alas dikelompokkan ke dalam satu wilayah administrasi kabupaten Aceh Tengah. Pengelompokan ini juga melanjutkan pengelompokan hukum adat yang dilakukan oleh Van Vollenhoven pada masa penjajahan. Van Vollenhoven mengelompokkan Gayo dan Alas sebagai satu kawasan hukum adat.<sup>24</sup>

Pada tahun 1967, masyarakat Alas diizinkan untuk membentuk kabupaten sendiri, kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2002 dan 2004 dua kabupaten lainnya dibentuk untuk mempercepat pembangunan di wilayah tengah Aceh. Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan pusat Kerajaan Petiamang, berpisah dari Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2002. Sedangkan pada tahun 2004, Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan wilayah dua kerajaan; Syiah Utama dan Bukit berpisah dari kabupaten induknya, Kabupaten Aceh Tengah. Sementara tiga kerajaan lainnya; Linge, Bukit dan Cik Bebesen berbagi wilayah dan pengaruh di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan sejarah lisan lokal, masyarakat Bebesen merupakan keturunan dari masyarakat Batak. Penelitian kebahasaan dan arkeologis yang telah disebutkan di atas berperan penting untuk menyanggah sejarah lisan lokal dan menghilangkan konflik internal antara dua kebudayaan besar di Aceh Tengah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat Batak kemungkinan besar bernenek-monyangkan orang Gayo. Dengan demikian masyarakat Bebesen adalah orang Gayo yang pernah pindah ke Sumatera Utara dan kemudian kembali ke Gayo pada masa-masa sebelum penjajahan.<sup>25</sup> Walau hasil penelitian tersebut sudah memberikan sanggahan terhadap sejarah lisan, masih banyak masyarakat Gayo, terutama orang tua, yang masih meyakini akan kebenaran sejarah lisan mereka tentang asal usul masyarakat Bebesen. Sejarah lisan dengan beragam versi ini masih diturunkan ke generasi muda saat ini.

## 2. Perkembangan Islam pada Masa Kolonial

Tidak banyak diketahui tentang sejarah Islam di Gayo sebelum kedatangan Belanda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keberadaan masyarakat Gayo telah diketahui melalui beberapa literatur Aceh; Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Aceh. Hikayat Aceh menyebutkan bahwa sekitar masa Sultan Iskandar Muda, masyarakat

---

<sup>24</sup> C. van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931)*, ed. oleh J. F. Holleman, trans. oleh J. F. Holleman, Rachel Kalis, dan Kenneth Maddock, Translation Series ; 20. 830293302 (The Hague: Nijhoff, 1981).

<sup>25</sup> lintasgayo.co, "Fakta di Ceruk Mendale (Seharusnya) Mengakhiri Polemik Uken-Toa," news, *Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, (28 Juni 2015), <http://lintasgayo.co/2015/06/28/fakta-di-ceruk-mendale-seharusnya-mengakhiri-polemik-uken-toa>; lintasgayo.co, "Politik Uken-Toa Muncul di Akar Rumput, Bukan di Perdu!," news, *Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, (9 Januari 2015), <http://lintasgayo.co/2015/09/11/politik-uken-toa-muncul-di-akar-rumput-bukan-di-perdu>.



Gayo telah memeluk Islam dan tunduk kepada Kesultanan Aceh. Namun, tidak banyak diketahui tentang perkembangan Islam di masyarakat Gayo pada saat itu hingga sebelum kedatangan Belanda.

Menurut Alyasa Abubakar, salah seorang Gayo dan profesor dalam bidang Usul Fiqh di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, bahwa sangat sedikit sekali literatur Islam yang beredar di Gayo sebelum kedatangan Belanda. buku paling populer yang ada di Gayo, menurutnya, adalah buku tulisan tangan tentang pengantar membaca Al-Quran. Peredaran buku ini sangat terbatas dikarenakan biaya produksi yang mahal, termasuk biaya untuk kertas dan penulis. Bahkan Alquran hanya beredar satu buah di setiap satu kampung. Bersama dengan Bawar, senjata sejenis pisau/rencong/keris/parang kecil tanda kekuasaan, Alquran disimpan sebagai tanda kekuasaan otonomi di bawah kesultanan Aceh. Dengan demikian, Al-Quran merupakan benda sangat bernilai bagi seorang raja dan penerusnya. Dan karenanya juga, kemungkinan jarang dibaca. Sangat sedikit pemuda Gayo yang mau belajar di sekolah agama karena keterbatasan fasilitas pendidikan dan juga karena waktu tempuh yang lama dari wilayah Gayo ke pesisir Aceh atau daerah lainnya melalui hutan rimba. Pemuda-pemuda pergi merantau belajar agama biasanya dipersiapkan sebagai pengganti imam kampung.<sup>26</sup>

Jumlah orang belajar ke sekolah agama meningkat setelah kedatangan penjajah Belanda ke wilayah tengah Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1902. Awalnya ekspedisi militer Belanda datang ke daerah Gayo dalam misi pengejaran Sultan Aceh yang lari ke Pamar. Meski pengejaran mereka tidak membuahkan hasil, mereka melihat bahwa dataran tinggi Gayo cocok dijadikan sebagai daerah pertanian mereka.<sup>27</sup>

Belanda kemudian memperkenalkan berbagai jenis tanaman hortikultura seperti kentel, kubis dan jenis lainnya. Mereka juga membuka perkebunan kopi dan teh selain juga menderes getah pinus yang tumbuh di pegunungan Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues saat ini. Belanda membawa orang dari daerah yang berbeda untuk dijadikan buruh pertanian dan perkebunan mereka. Sebagian dari mereka adalah tahanan perang seperti orang Jawa dan Batak. Sebagian adalah pekerja lepas seperti orang Tiongkok. Dan sebagian lainnya adalah orang-orang yang telah bekerja untuk Belanda sebagai tenaga pendidik seperti orang Tapanuli dan Minangkabau. Ada juga orang-orang yang datang dengan sendirinya ke daerah Gayo. Orang-orang ini kebanyakan adalah Minangkabau dan Tiongkok. Orang Minangkabau bekerja sebagai guru dan sebagiannya berdagang sembari berdakwah. Menurut memori orang-orang tua Gayo, mereka kerap menjual ketela rebus dan menjahit keliling. Sedangkan orang Tiongkok bekerja sebagai buruh bangunan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Al Yasa' Abubakar, "Syari'at Islam dan Budaya Aceh Pedalaman - Lintas Gayo," 2012, <http://www.lintasgayo.com/28428/syariat-islam-dan-budaya-aceh-pedalaman.html>.

<sup>27</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 76-79.

<sup>28</sup> Ibid.

Selain memperkenalkan jenis tanaman baru dan sistem perkebunan, Belanda juga membuka jalan yang menghubungkan daerah pesisir, Bireuen, dengan daerah Gayo di pedalaman rimba. Pembangunan jalan itu diperuntukkan terutama untuk membawa hasil pertanian dari tengah Aceh ke pesisir untuk kemudian di ekspor. Kemudian hari hingga kini, jalan ini menjadi jalan penghubung utama antara daerah tengah dan pesisir. Pertanian yang mereka perkenalkan juga, seperti kopi arabika, kental dan kubis menjadi pekerjaan dan penghasil utama masyarakat Gayo.

Selain pertanian dan perkebunan, Belanda juga membangun sekolah untuk mempersiapkan orang Gayo sebagai tenaga administrasi mereka. Awalnya pada awal tahun 1910-an, Belanda mendirikan dua sekolah rakyat. Hingga tahun 1940, Belanda telah mendirikan sebelas sekolah rakyat lainnya.<sup>29</sup> Mereka memperkerjakan orang Tapanuli terutama Minangkabau yang telah bersentuhan dengan pemikiran pembaharuan Islam yang baru dikembangkan oleh Muhammadiyah – sebuah organisasi muslim yang didirikan di Jogjakarta pada tahun 1902. Berdasarkan kurikulum Belanda saat itu, orang Minangkabau mengajarkan dasar-dasar aritmetika dan baca tulis. Ketika memungkinkan, mereka memasukkan ajaran-ajaran reformis Islam di sela-sela pengajaran kelas.<sup>30</sup>

Belanda juga mengirimkan beberapa siswa Gayo, yang telah menamatkan sekolah rakyat, untuk mendapatkan pendidikan tingkat lanjut di Kutaraja dan Pematang Siantar. Di sana, siswa-siswa itu bersentuhan langsung dengan diskusi dan gerakan nasionalis. Ketika mereka kembali ke Gayo, mereka mengambil peran orang Minangkabau dan Tapanuli sebagai guru sekolah rakyat.<sup>31</sup> Selain itu, mereka juga kemudian terlibat dan berbagai gerakan perlawanan melawan Belanda di Gayo.<sup>32</sup>

Tidak banyak yang mengikuti sekolah yang didirikan oleh Belanda. Orang-orang tua Gayo melarang pemuda Gayo untuk sekolah di sana karena sekolah tersebut mengajarkan huruf roman yang diasosiasikan sebagai huruf kafir. Mereka khawatir bila pemuda mereka belajar dengan huruf tersebut dan bukan dengan huruf arab-jawi, mereka akan menjadi kafir bahkan murtad.<sup>33</sup>

Menurut PaEni, Muhammadiyah berkontribusi sangat besar dalam mengajak orang Gayo untuk mau belajar di sekolah-sekolah Belanda. Selain juga karena mereka Muslim modernis dan menyisipkan ide-ide pembaharuan Islam di sela-sela kelas, mereka juga mendirikan beberapa sekolah alternatif untuk tujuh tahun pendidikan. Karena mereka di bawah pengawasan Belanda, model dan kurikulum sekolah tersebut mengikuti model dan kurikulum sekolah Belanda. Sekolah-sekolah Belanda tersebut

---

<sup>29</sup> PaEni, *Riak di laut tawar*, 187; Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 94.

<sup>30</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 97.

<sup>31</sup> PaEni, *Riak di laut tawar*, 187.

<sup>32</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 94.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 94.

mengajarkan pengetahuan agama sekaligus pengetahuan umum seperti arimatik dasar. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda dan Melayu.<sup>34</sup>

Hingga akhir tahun 1935, jumlah pelajar di sekolah Minangkabau meningkat. Sebelumnya, sangat sulit meyakinkan orang Gayo tentang pentingnya sekolah di sekolah Belanda. Belanda telah diasosiasikan dengan kafir. Terlebih, mereka menggunakan bahasa Belanda dan Melayu sebagai pengantar dan memperkenalkan huruf roman, bukan huruf arab-jawi yang dikenal oleh orang lokal. Keberadaan sekolah Minangkabau sebagai sekolah alternatif berhasil meningkatkan minat orang lokal untuk bersekolah. Orang Minangkabau kemudian mendirikan dua sekolah lainnya dengan mengambil model dari Belanda: *Institut voor Lagaer Onderwijs* (IVOORLO) and H.I.S.<sup>35</sup> Untuk menghindari gangguan dari Belanda, orang Minangkabau mengajak aristokrat lokal yang dekat dengan Belanda untuk menjadi bagian dari sekolah Minang tersebut. Pada tahun 1936, misalnya, organisasi Muhammadiyah mendirikan sekolah bernama Sekolah Jacob di Teritit. Jacob adalah nama akhir dari anak lelaki Raja Ilang.<sup>36</sup>

Interaksi budaya antara orang lokal dan pendatang memberikan inspirasi bagi orang lokal untuk lebih banyak belajar agama di daerah perantauan. Daerah-daerah sekolah favorit mulai dari jaman penjajahan Belanda hingga awal-awal kemerdekaan adalah Pulo Kiton di Bireuen, Minangkabau dan Bandung. Tentunya sebagian orang juga pergi belajar agama ke daerah-daerah lainnya di Nusantara. Di antara orang-orang Gayo yang kembali dari rantau dan memberikan pengaruh keagamaan yang kuat adalah Damanhuri dan Abdul Jalil.

Kedua tokoh agama yang disebutkan di atas belajar agama di luar Gayo. Damanhuri, yang kemudian dikenal dengan nama Tengku Silang,<sup>37</sup> belajar di Pulau Kiton dan kemudian ke Pesantren Sulaiman Al-Rasuli di Candung, Sumatera Barat. Sekembalinya ke Gayo, dia mendirikan sekolah bernama Tarbiyah Islamiyah di Desa Jongok Bathin, Kebayakan. Pada masa tersebut, beberapa orang Gayo juga mulai mendirikan sekolah mereka sendiri mengikuti model sekolah Belanda. Salah satunya misalnya sebuah sekolah yang didirikan di atas lahan wakafnya Tengku Bahagia Cut (dikenal dengan sebutan Tengku Lah) di Kute Kring. Dia meminta Damanhuri untuk memimpin sekolah tersebut.<sup>38</sup>

Di tahun terakhir penjajahan Belanda, 1943, Tengku Damanhuri juga memobilisasi massa yang mengumpulkan sedekah dan wakaf guna pendirian sekolah tingkat lanjut. Bila sekolah-sekolah yang telah ada berfokus pada pendidikan agama tingkat dasar,

---

<sup>34</sup> Ibid., 97.

<sup>35</sup> PaEni, *Riak di laut tawar*, 187.

<sup>36</sup> Ibid., 188.

<sup>37</sup> Menurut Azmi Fikri, cicit dari Tengku Silang, panggilan Silang disebabkan karena kulit Tengku Damanhuri yang putih bersih namun tipis. Bila di siang, kulitnya akan berwarna kemerahan (ilang). Karenanya kemudian dia dipanggil Si Ilang, si kemerahan. Panggilan ini kemudian berubah menjadi Silang.

<sup>38</sup> PaEni, *Riak di laut tawar*, 187.

Tengku Damanhuri kemudian menginisiasi pendirian sekolah tingkat lanjut bidang sains. Sekolah itu direncanakan akan diberi nama Sekolah Teknik Pertama Islam. Tengku Damanhuri, dengan dukungan politik dari Raja Bukit, Reje Zainuddin, mengajak masyarakat dari kerajaan bukit untuk mengumpulkan harta untuk membeli sebidang tanah. Disayangkan, meski tanah telah dibeli, Tengku Damanhuri kemudian wafat pada usia yang masih muda. Setelah dia wafat, Penjajahan bertukar tangan dari Belanda ke Jepang yang dikenal lebih kejam dari Belanda. Pasca Kemerdekaan, sebuah sekolah untuk yatim piatu, bernama Budi Luhur, kemudian didirikan di atas tanah wakaf masyarakat Gayo dahulu. Beberapa tahun Setelah konflik GAM-TNI berakhir pada tahun 2005, tepatnya pada masa Nasruddin sebagai bupati, setengah dari tanah wakaf tersebut dijual ke bank Aceh.<sup>39</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, menurut Sirajuddin, imam masjid Al-Abrar Kebayakan, selain Tarbiyah Islamiyah, didirikan sekolah Islam bernama *Ta'limul Islamiyah* di desa Gunung Kebayakan, tepatnya di sisi sungai Meunasah. Sekolah ini merupakan bagian dari sekolah pembaharuan Islam yang didirikan oleh orang Gayo sendiri. Sebelum kembalinya Abdul Jalil, Damanhuri mendominasi pengaruh pemikiran keagamaan tradisional di wilayah Gayo. Pemikiran tradisional ini dikenal dengan sebutan *kom tue*.<sup>40</sup>

Beberapa orang Gayo lainnya pergi ke pulau Jawa. Diantaranya adalah Abdul Jalil. Dia belajar di Pesantren cabang Al Irshad di Bandung. Di sana, dia belajar pemikiran Islam modernis di sekolah Persatuan Islam (Persis). Sekolah tersebut mengadopsi pemikiran-pemikiran muslim terkemuka yang dipublikasi melalui di majalah Al-Manar yang didirikan oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Pemikiran-pemikiran dalam majalah tersebut selalu menjadi pemantik diskusi dan pelajaran di kelas. Abdul Jalil terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Sekembalinya ke Gayo pada tahun 1937, dia mendirikan sekolah bernama Taman Pendidikan Islam, yang kemudian dikenal dengan singkatan PI. Sekolah tersebut menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Di kemudian hari, para pendiri dan pegiat sekolah tersebut juga mendirikan perusahaan yang sebagian keuntungannya diperuntukkan untuk pembiayaan sekolah. Kelompok ini mengampanyekan pemurnian agama melebihi kampanye kelompok Muhammadiyah.<sup>41</sup> Bersama-sama dengan Damanhuri, Abdul Jalil berbagi pengaruh sosial keagamaan di Gayo. Kelompok modernis pimpinan Abdul Jalil dan Muhammadiyah kemudian dikenal dengan sebutan *kom mude* (kaum muda).<sup>42</sup>

Menurut Alyasa Abubakar, Abdul Jalil juga memobilisasi sedekah dan wakaf masyarakat Gayo untuk membeli buku dan membangun perpustakaan daerah.

---

<sup>39</sup> Pemda Aceh Tengah dan PT. BPD Aceh Cabang Aceh Tengah, "Arsip Tanah Budi Luhur Takengon," 2009.

<sup>40</sup> PaEni, *Riak di laut tawar*, 184.

<sup>41</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 99.

<sup>42</sup> Ibid.; PaEni, *Riak di laut tawar*, 184.

Perpustakaan tersebut terletak di daerah Kelaping yang pada saat itu juga merupakan pusat kota dimana terminal loket bus Aceh Tengah dan Aviat berada. Buku-buku yang dibeli adalah buku-buku yang bermutu dan bisa diakses oleh siapa saja. Menurutnya, banyak masyarakat pesisir yang datang ke perpustakaan tersebut untuk membaca buku-buku koleksi perpustakaan tersebut. Disayangkan, pasca kemerdekaan, perpustakaan tersebut terbakar. Koleksi-koleksinya pun tidak sempat diselamatkan.

Sepertinya, terma *kom tue* dan *kom mude* di atas muncul pertama sekali di Minangkabau pada awal tahun 1900-an. Kedua terma tersebut merupakan pembeda antara kelompok yang memahami Islam dengan tidak mempertanyakan tradisi, menuntut kepatuhan pelajar terhadap guru, cenderung lunak terhadap dan bernegosiasi dengan adat, dan mengakui otoritas seorang ulama untuk mengambil ijtihad, lebih perhatian pada praktik dan pengetahuan tarekat serta sufisme daripada Fiqh. Dalam Fiqh pun, mereka mempraktik mazhab Syafii. Di Minangkabau, kelompok ini pertama sekali dipimpin oleh Ahmad Chatib (1860-1916), yang belajar dan kembali dari Mekah. Kelompok ini disebutkan dengan kaum tua. Sedangkan kelompok yang membawa misi pembaharuan dan pemurnian agama dari praktik-praktik yang bertentangan dengan agama, adat, menolak sufisme, menonjolkan rasionalitas dan praktik beragama yang kemudian berubah menjadi kebebasan dan berijtihad. Kelompok ini disebut dengan kaum muda. Di Padang, Sumatera Barat, gerakan ini dimulai oleh Sheikh H.A Karim Amrullah.<sup>43</sup>

Kedua kelompok tersebut: kaum tua dan muda, juga gerakan politik. Kaum tua menolak bekerja sama dengan penguasa. Anggota mereka adalah pengusaha kecil dan petani. Sedangkan kelompok kaum muda cenderung bekerja sama dengan penguasa dan mempromosikan modernisasi pendidikan. Mereka membangun metode pembelajaran dan kurikulum baru yang menggabungkan pelajaran agama dan sekuler, membuat sistem perangkan dan memperkenalkan materi-materi ajar terbaru. Sekolah ini kemudian hari dikenal Madrasah Modern yang menjadi model sekolah bagi anggota kaum muda lainnya.<sup>44</sup> Kebanyakan dari orang Minangkabau yang bermigrasi ke Gayo sepertinya bagian dari kelompok kaum muda. Mereka bekerja di sekolah-sekolah Belanda, mendirikan sekolah dengan mengikuti model sekolah Belanda, dan juga meminta penguasa lokal untuk menjadi pelindung sekolah-sekolah mereka. Ini semua menunjukkan kecenderungan kerja sama mereka dengan penguasa.

Pada tahun 1930-an, sekelompok ulama lokal, yang dipimpin oleh Tengku Yahya, menemukan genre tradisi lisan baru yang disebut dengan *sya'er*. Awalnya *sya'er* tersebut digunakan untuk mengajar teks agama dan pelajar mengaji. *Sya'er* tersebut dilantunkan di masjid/musala dan sekolah-sekolah Islam. Tengku Yahya dan

---

<sup>43</sup> Taufik Abdullah, "Schools and Politics: The 'Kaum Muda' Movement in West Sumatra (1927-1933)" (Cornell University, 1970), 11, 34, 41-42, 48, 66, <http://search.proquest.com/docview/302519029/>.

<sup>44</sup> Ibid.

kelompoknya menggunakan sya'ir hanya untuk mempromosikan tafsir dan berusaha untuk menghindari topik-topik agama yang kontroversial. Sya'ir tersebut berubah menjadi media kritik sosial di tangan Abdurrahman Daudy.<sup>45</sup>

Dalam sebuah wawancara, L.K. Ara, penyair senior Gayo dan nasional, mengatakan bahwa Abdurrahman Daudy mengenyam pendidikan sekolah rakyat pada masa Belanda (*volkschool*). Di sekolah itu, dia bersentuhan langsung dengan ide pembaruan Islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau. Dia juga mengaji di pesantren Gele Gantung, Kebayakan. Di sana dia belajar tafsir, Bahasa Arab, Hadits, dan tulisan arab-melayu. Menurut John R. Bowen, dia juga belajar agama di bawah bimbingan langsung Abdul Jalil, yang merupakan tokoh utama yang mengampanyekan pergantian adat dengan norma-norma Islam. Abdurrahman Daudy memilih jalan yang lebih moderat dibandingkan dari gurunya tersebut. Sepertinya karena pengaruh dari pesantren tradisional, Gele Gantung, dia lebih memilih untuk mempertahankan adat dengan mengubahnya dan memasukkan nilai-nilai islami ke dalamnya.<sup>46</sup> Pada tahun 1937, diuntungkan dengan latar belakang pendidikannya, dia menulis tafsir 40 ayat dan 49 Hadist pilihannya. Tafsir tersebut berbahasa Gayo dan berjudul Tafsir Gayo yang dipublikasikan di Kairo pada tahun 1938.

Dalam ingatan Sirajuddin, imam masjid Abrar Kebayakan, Abdurrahman Daudy adalah seorang kritikus dan budayawan. Dia menulis sejarah lokal dan lusinan syair Didong, salah satu seni tradisi lisan yang dimainkan secara berkelompok dan dipimpin oleh seorang Ceh yang bertindak sekaligus sebagai vokal utama. Banyak Ceh yang berkonsultasi syair dengan dia sebelum penampilan masing-masing. Proses ini memungkinkan Abdurrahman untuk memasukkan ide-ide reformasi Islamnya ke dalam syair-syair Ceh Didong tersebut. Setelah dia menyelesaikan Tafsir Gayo, dia juga meminta Ceh-Ceh tersebut untuk mendendangkannya ke dalam Didong mereka. Dengan demikian, kritik sosial keagamaan Abdurrahman disampaikan ke audien yang lebih luas. Tafsir Gayo tersebut juga didendangkan di masjid dan mushalla setiap hari sebelum azan magrib dikumandangkan.

Buku tersebut adalah buku tafsir pertama dan seperti yang terakhir hingga saat ini yang ditulis oleh Gayo. Meski daerah tersebut telah melahirkan banyak tokoh intelektual lokal dan nasional, belum ada seorang pun yang berhasil menghasilkan karya tafsir yang ditulis dengan gaya sastra sya'ir dan ditujukan sebagai kritis sosial.

### 3. Klasifikasi Adat

Salah satu perkembangan penting dari Islam pada masa kolonial Belanda di daerah Gayo adalah pengkategorian adat. Para ulama-ulama pada masa kolonial Belanda membagi adat ke dalam lima kategori; 1. *Adatullah*. 2. *Adat Muhakammah*. 3. *Adat*

---

<sup>45</sup> John R. Bowen, "A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse," *The Journal of Asian Studies* 52, no. 3 (1993): 632-33.

<sup>46</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 243.

*Muthma'innah*. 4. Adat *Jahiliyah* dan 5. *Resam*. Pengkategorian tersebut sepertinya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memilah praktik-praktik adat yang sejalan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Pinan, yang merupakan bagian dari Tentara Giyugun bentukan Jepang, klasifikasi tersebut pertama sekali muncul pada masa penjajahan Belanda.<sup>47</sup> Sepertinya, kategori itu muncul setelah tahun 1930-an ketika proses islamisasi di Gayo meningkat. Kemungkinan, klasifikasi tersebut tidak dibuat oleh kelompok *kom mude* yang berkeinginan untuk menghapus adat secara keseluruhan. Tetapi, kategori tersebut barangkali dibuat oleh *kom tue* yang berusaha memilah dan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam praktik adat dengan terlebih dahulu mengklasifikasi beragam jenis praktik pada adat.

Selama penelitian lapangan, semua narasumber yang saya wawancara tentang kategori-kategori adat tersebut tidak memiliki kata sepakat tentang definisi masing-masing kategori. Berbeda narasumber memberikan penjelasan yang berbeda. Kategori ini juga sepertinya hanya pengetahuan beberapa orang saja. Hal itu karena banyak narasumber tidak memiliki pengetahuan apa pun yang berkaitan dengan sejarah, definisi dan praktik masing-masing kategori ketika ditanya tentang lima kategori adat tersebut untuk pembelajaran lebih dalam dan juga untuk proses klarifikasi. Namun, semuanya sepakat bahwa kategori tersebut telah ada semenjak dahulu. Namun, mereka tidak mampu menjelaskan konteks sejarah keberadaannya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kategori-kategori tersebut, penelitian ini mencoba menarik satu benang merah dari narasumber-narasumber yang memiliki pengetahuan, meski berbeda satu dari lainnya, untuk menjelaskan masing-masing kategori.

### 1) **Adatullah**

*Adatullah* adalah praktik adat yang secara jelas mensyiarkan dan mempraktikkan ajaran Islam. praktik *adatullah* seperti konsep dan praktik *sumang* (sumbang/malu) yang merupakan aturan dan etika sosial yang mengatur sikap seseorang terhadap orang lain atau sedang melakukan sesuatu dengan orang lain. Praktik seperti *sumang* ini disinyalir mendapatkan inspirasi dari ajaran Al-Quran tentang pentingnya berperilaku sopan, menghindari zina dan tata kerama sosial dan hubungan lelaki dan perempuan. Praktik-praktik lain seperti seremoni khitan, ritual pernikahan, *akikah* (Gayo: *turun mani*) dan pemberian nama untuk penyambutan anggota keluarga baru (bayi) dan kematian. Pada prinsipnya, praktik adat pada kategori ini harus sesuai atau diharapkan bersesuaian dengan ajaran agama Islam. Apabila terjadi perselisihan tentang praktik yang bagaimana yang masuk kategori *adatullah* dengan kategori yang lain, orang Gayo dahulu akan merujuk pada prinsip adat sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> A.R Hakim Aman Pinan, "Pelestarian Budaya Tradisional Masyarakat Pendukungnya" (Unpublished, 1997).

*Dëwë hadis, ulakën ku ferman*

(perbedaan pandangan tentang hadis, kembalikanlah ke Firman [Allah/Al-Quran])

*Dëwë ëdët, ulakën ku empue*

Perbedaan tentang adat, kembalikan ke pemiliknya (ahli adat))

Ungkapan adat Gayo tersebut menegaskan bahwa perbedaan pandangan adalah sebuah kewajiban. Bila tidak kunjung menemukan titik temu, maka perbedaan itu harus diselesaikan dengan cara kembali ke teks utama dalam Islam atau kepada empunya urusan (ahlinya). Pada permasalahan ajaran agama, bila ada perbedaan pandangan tentang hadis (ajaran agama) maka selesaikanlah perbedaan itu dengan mengembalikannya kepada asas yang paling dasar dalam Islam, yaitu firman Allah atau Al-Quran. Sedangkan bila terjadi perbedaan pandangan dan praktik adat, maka berkonsultasi dan kembalikanlah perbedaan tersebut kepada para ahlinya. Pada masa dahulu, ulama dan tokoh agama lainnya di Gayo juga dianggap sebagai tokoh adat. Dengan demikian, makna kembalikan kepada ahli juga dapat berarti mengembalikan perbedaan adat tersebut kepada ulama. Dengan demikian, perdebatan tentang agama dan budaya dapat diselesaikan dengan tetap berpijak pada ajaran agama Islam. Dengan prinsip ini, maka semua praktik adat pada kategori *adatullah* merupakan semua praktik yang secara lugas dan tegas melaksanakan ajaran Islam.

Ungkap tersebut dapat juga diartikan sebagai hierarki sumber pengetahuan dan hukum. Dimana adat terletak pada posisi paling mendasar yang melandasi semua pengetahuan dan praktik. Dengan hierarki tersebut dan dengan ulama yang berperan sebagai tokoh sentral masyarakat, adat selalu diupayakan berada dalam payung agama sehingga bersesuaian atau mendapat justifikasi praktik dari hadis Rasul dan Al-Quran. Bila terdapat perbedaan tentang hadis tersebut, maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah mengembalikan semua perbedaan dengan merujuk kepada Al-Quran. Tokoh adat, dimana ulama juga merupakan bagian darinya, memainkan peranan yang sangat penting menjalankan hierarki norma dan hukum ini. Secara berurutan, maka Al-Quran adalah sumber hukum utama dan berapa paling atas, kemudian ditepati oleh Hadist pada urutan kedua dan yang terakhir adalah adat.

## 2) Adat Muhakammah

Adat *Muhakammah* adalah praktik adat yang memiliki konsekuensi hukum. Menurut Yusen Saleh, tokoh adat Gayo di Aceh Tengah, praktik norma-norma pada adat *Muhakammah* dibuat berdasarkan kesepakatan bersama tentang sesuatu. Karena kemudian masyarakat mempertahankan kesepakatan bersama tersebut, norma-norma tersebut berubah perlahan menjadi adat kebiasaan. Perbuatan Orang-orang yang berlawanan dengan kesepakatan akan menghadapi hukuman tertentu seperti



pengucilan sosial dari masyarakat. Adat Muhakammah ini berdiri atas prinsip adat sebagai berikut

*Kunul sara tamunën*

*Bëlúh sara lolotën*

*Bulët lagü lumut*

*Tirus lagü gölas*

*Ratip músara anggük*

*Nyawa músara pelük*

Duduk di ketinggian yang sama

Pergi dalam barisan yang satu

Bulat seperti gedebok (batang semu pisang)

Bulat seperti gagang pancing

Berzikir angguk bersama

Nyawa dalam satu peluk

### 3) Adat Muthmairnah

Adat *Muthma'innah* adalah praktik adat yang baik, tidak bertentangan dengan ajaran agama dan juga tidak secara langsung mengamalkan ajaran agama. Praktik adat seperti ini adalah seperti upaya mempertahankan ikatan *belah* (klan) dan larangan untuk menikah secara endogami (menikah dengan anggota belah yang sama). Menurut Hidayat Syah, imam kampung Bathin Baru, dan Ibrahim, tetua adat Kampung Nunang Antara, meskipun Islam mengizinkan penganutnya untuk menikah endogami, masyarakat Gayo lebih memilih untuk melarang praktik pernikahan tersebut. Secara kasat mata, larangan adat tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang membolehkan menikah asal tidak dengan garis keturunan ayah. Namun, menurut beberapa narasumber, seperti Yusen Saleh, Mahmud Ibrahim, dan Hidayat Syah, larangan tersebut karena, pada tempo dulu, jumlah masyarakat Gayo masih sangat sedikit. Orang Gayo pada saat itu barangkali khawatir bila pernikahan endogami diizinkan, maka apabila salah seorang pasangan suami istri bertengkar, urusan rumah tangga mereka akan merambah ke seluruh warga desa yang dulu sangat sedikit bak keluarga. Bila itu terjadi, maka keharmonisan dan kesatuan desa akan terganggu. Apalagi dahulunya, hubungan kekerabatan seluruh anggota klan antara satu dengan lainnya sangat dekat seperti saudara kandung. Anak tetangga bebas masuk, bermain, makan bahkan tidur di rumah tetangga lainnya. Untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan warga, maka orang dahulu melarang pernikahan endogami. Adat ini masih berusaha untuk dipertahankan hingga saat ini, meski tantangan budaya, perkembangan penduduk dan proses islamisasi terus meningkat dari waktu ke waktu.

### 4) Adat Jahiliyah

Adat *jahiliah* adalah praktik adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. contohnya, menurut Yusen Saleh, adalah berjoget pada saat pesta pernikahan. Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah mengedarkan selebaran tentang seruan untuk tidak mengadakan nyanyian yang diiringi keyboard dan joget-jogetan/berdansa pada pesta pernikahan. Tradisi menyanyi dan berdansa pada pesta perkawinan sudah menjadi

bagian dari tradisi pernikahan masyarakat Gayo semenjak penjajahan Belanda. Penyanyi sering melantunkan berbagai genre lagu mulai dari lagu daerah hingga pop dan dangdut. Kedua mempelai pengantin juga diundang, seringnya dengan paksaan dari pihak keluarga atau tuan rumah, untuk berdansa bersama keluarga besar bisan yang menjadi tuan rumah pesta.

Menurut Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan, dua institusi yang menyiapkan draf selebaran yang ditandatangani oleh Nasruddin (bupati saat itu), bahwa adat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena bisa menimbulkan nafsu birahi dan juga karena membentuk tubuh penyanyi, penari, dan lainnya yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Karena itu, kebiasaan berjoget yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi pernikahan harus dilarang.

Namun, banyak yang tidak setuju dan menentang selebaran yang dikeluarkan oleh kedua institusi agama tersebut. Kelompok yang menentang pada umumnya adalah artis, budayawan, dan Ceh didong setempat. Misalnya, Ceh Kala Empan. Menurutnya, permasalahan utama bukanlah pada keyboardnya. Keyboard dan alat musik lainnya yang digunakan untuk memeriahkan sebuah pesta pernikahan hanyalah benda mati yang digerakkan dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang menjadi permasalahan utama adalah manusianya yang terkadang menari tidak sesuai dengan norma yang ada.

Dalam sebuah wawancara, Ceh Kala Empat mengaku pernah menyaksikan bagaimana seseorang berusaha menghentikan nyanyian di sebuah pesta pernikahan. Dia menceritakan bahwa suatu hari dia ikut mengantar mempelai perempuan yang kebetulan berasal dari desanya. Dia bersama rombongan mempelai mengantar pengantin tersebut ke sebuah desa di pinggir danau Lot Tawar.

Setelah selesai semua prosesi penyambutan membelai dan kedua mempelai menaiki pelaminan, nyanyian Keyboard pun dimulai. Semua tampak normal baginya. Hingga suatu waktu seorang tamu berpakaian serba putih, yang terlihat seperti orang alim untuknya, berdiri dan berusaha menghentikan nyanyian tersebut.

Keadaan berubah menjadi kaku dan aneh. Ceh Kala Empat kemudian berdiri berusaha menengahi keadaan tersebut. Dia memang dikenal sebagai seorang Ceh Didong. Lagunya sendiri sering berupa kritikan moral, adat, dan kisah kehidupan sebagai pembelajaran. Misalnya salah satu lagunya didong yang sempat populer berjudul Keriting Salon. Melalui lagu itu, dia mengkritik kebiasaan baru saat itu yang mulai suka bergaya dan bertindak yang tidak sesuai dengan adat Gayo. Mereka lebih suka memilih referensi budaya luar daripada budaya sendiri. Karena berbagai lirik didongnya, Ceh Kala Empan kemudian juga dikenal sebagai orang yang mengerti adat.

Dia lalu naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Dia kemudian menjelaskan bahwa yang kita pegang, yang kita tekan hingga berbunyi seperti keyboard dan juga panggung tempat dia dan penyanyi pertama berdiri hanyalah sebuah media. Mereka adalah benda. Menurutnya, benda tidak pernah salah. Yang salah adalah penggunaannya.

Jadi tidak layak kalau benda itu kita hentikan dan singkirkan. Yang harus diperbaiki adalah sikap kita di atas panggung.

Menurut Kala Empan, bernyanyi dan menggerakkan tubuh menikmati nyanyian itu sendiri sudah menjadi tradisi orang Gayo sejak dulu. Orang Gayo dikenal dengan kebudayaan seninya yang tinggi. Dulu juga ada ulama besar, tapi kita juga masih bernyanyi dan berdidong, ujanya. Didong sudah menjadi bagian kehidupan. Jadi tidak ada alasan untuk menghapuskan tradisi menyanyi kita. Hanya etikanya saja yang harus dijaga. Lagi pula menurutnya, dahulu ajaran agama sering disampaikan melalui nyanyian seperti Didong dan tentunya melalui Sya'ir yang dilantunkan dikala menjelang waktu salat magrib.

Agama dan seni selalu menjadi pembicaraan dan perdebatan. Proses islamisasi dan dakwah yang dibawa oleh orang luar sering cenderung menghakimi budaya lokal. Masyarakat lokal kerap beranggapan bahwa budaya mereka tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun bagi pendakwah pendatang dari luar dan hanya melihat sekilas, cenderung membenturkan teks agama yang mereka pelajari di pengajian dan pesantren dengan kebudayaan orang lain. Sehingga budaya dan agama sering menjadi perdebatan dan bahkan konflik.

Karena selebaran itu hanya berbentuk seruan dari pemerintah, tidak banyak yang peduli terhadapnya. menurut warga setempat, masih banyak masyarakat yang merayakan pesta pernikahan dengan menyewa keyboard beserta penyanyinya.

## 5) Resam

Kategori terakhir yang dibuat oleh para ulama Gayo pada masa kolonial Belanda adalah *resam*. Resam adalah tradisi yang tidak dipraktikkan oleh semua orang Gayo. *Resam* adalah praktik budaya, kebiasaan, atau peraturan yang disepakati oleh kelompok kecil masyarakat tertentu seperti desa bahkan mungkin lebih kecil. *Resam* bersifat lokal dan tidak dipraktikkan atau menjadi budaya masyarakat luas. Menurut Alyasa Abubakar, *resam* adalah wujud adat sebenarnya yang dipraktikkan berbeda dari satu wilayah atau kelompok masyarakat ke kelompok lainnya. Meskipun terdapat kesamaan beberapa praktik karena kelompok tersebut terinspirasi dari norma adat yang sama seperti dari adat Gayo yang lebih luas daripada *resam*, namun adat yang aktual dan riil adalah *resam*. Hal ini karena adat lebih berbentuk sebagai sebuah konsep yang abstrak tentang sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Sedangkan *resam* adalah aktualisasi dari konsep abstrak tersebut yang dipraktiknya pada kelompok masyarakat. Dengan demikian *resam* adalah adat yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat yang bentuk praktiknya berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena proses adaptasi norma adat yang luas dan abstrak ke dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di geografis tertentu dan berbeda dari masyarakat lain.

Saat ini, *resam* tersebut semakin menguat setelah pemerintah menyarankan membentuk peraturan desa atau, di provinsi Aceh, lebih dikenal dengan Qanun Kampung. Perda/Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 tahun 2011, juga sepertinya tidak lagi menggunakan kata *resam* untuk peraturan kampung tersebut. Tetapi menggunakan terma Qanun. Ini setidaknya menunjukkan fleksibilitas adat dalam mengakomodasi kebutuhan terbaru masyarakat dan pemerintah. Qanun ini semakin mempertegas perbedaan praktik dan aktualisasi adat dari satu kelompok masyarakat ke masyarakat lain.

#### 4. Perdebatan Paham Tradisionalisme dan Modernisme Islam

Salah satu puncak keagamaan pada masa penjajahan Belanda adalah perdebatan agama antara tokoh pilar *kom tue* dan *kom mude*. Perdebatan ini juga seperti menjadi puncak perselisihan pemahaman antara tradisionalis dan modernis. Pada masa pasca kemerdekaan, tidak pernah lagi terdengar jelas perdebatan dan perselisihan pemahaman terjadi di daerah Gayo.

Semenjak masa kolonial Belanda, kehidupan sosio-keagamaan masyarakat dipengaruhi oleh kedua kelompok ini; *kom tue* dan *kom mude*. Pada masa penelitian ini dilakukan perdebatan kedua kelompok yang terjadi pada masa kolonial Belanda tersebut masih kuat sekali dalam ingatan semua responden yang berusia di atas 50 tahun. Meskipun mereka tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, namun sepertinya mereka mendapatkan cerita yang disampaikan dari orang tua mereka atau dari orang lain. Ceritanya pun sepertinya sudah melalui proses standardisasi. Sehingga perbedaan narasi dari satu narasumber dengan narasumber yang lain sangat sedikit.

Perdebatan tersebut terjadi pada tahun 1939, Raja Zainuddin dari Kerajaan Bukit, dengan dukungan dari otoritas Belanda, memfasilitasi perdebatan antara *kom tue*, yang diwakili langsung oleh Tengku Damanhuri atau dikenal dengan Tengku Silang, dengan *kom mude*, yang diwakili langsung oleh Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil, yang terinspirasi dari organisasi Persatuan Islam (Persis) di Jawa Barat, mendapat dukungan dari kelompok Muhammadiyah, organisasi Islam yang berupaya memperbaharui Islam melalui jalur pendidikan dan program sosial lainnya. Perdebatan tersebut terjadi di halaman Kerajaan Bukit. Raja juga memilih Sembilan juri untuk perdebatan untuk menentukan pemenang. Termasuk salah satunya adalah Raja Zainuddin sendiri. Topik-topik yang diperdebatkan pada saat itu adalah permasalahan-permasalahan khilafiah yang tidak masuk dalam kategori wajib dalam Islam. topik-topik tersebut adalah tentang tahlilan, kunut, dan Peusujuk/Tepung Tawar (ritual pemberkatan yang berakar dari tradisi Hindu).

Ahmad Damahuri adalah pembela semua praktik ini. Sedangkan Abdul Jalil adalah penentang keras dan menganggap praktik tersebut sebagai bid'ah. Jalil berpendapat bahwa praktik tersebut tidak pernah dianjurkan oleh Islam dan tidak pernah dipraktikkan oleh Rasul. Pada pandangan kelompok modernis, tahlil dan semua bentuk

inovasi dalam Islam seperti berkenduri (makan bersama dalam sebuah kegiatan sosial keagamaan) tidak memiliki landasan dari ajaran Islam. Sementara Tepung Tawar/Peusujuk merupakan warisan kebudayaan Hindu. Karenanya ritual tersebut mengandung kesirikan. Sedangkan kunut, yang merupakan ibadah reguler tambahan pada kelompok tradisional untuk setiap salat sunah, hanya dipraktikkan setiap kali kaum muslimin ditimpa musibah. Kunut untuk mendoakan agar saudara muslim di tempat lain dibebaskan dari mara bahaya dan musibah yang menimpa. Bila tidak ada, maka kunut tidak boleh dilakukan.

Dalam pandangan Damanhuri, menurut ingatan responden penelitian ini, dengan sederhana menjelaskan bahwa semua praktik tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan, semuanya mensyiarkan ajaran Islam ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Semua praktik-praktik tersebut adalah media untuk menyampaikan ajaran Islam, terutama tauhid, dan membiasakan masyarakat untuk mengingat Allah. Tahlilan, misalnya, meski Islam tidak mendukung dan tidak ada sumber yang kuat yang mendukung praktik tersebut, tapi Islam juga tidak melarangnya. Dalam praktik tahlilan masyarakat sedang mengingat kematian dan pada saat yang bersamaan melakukan berzikir. Selain itu, tahlilan adalah media atau momen bersilaturahmi untuk memperkuat solidaritas dan persaudaraan. Para petani yang sibuk bekerja dari pagi hingga petang, seringkali tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu dengan kerabat atau warga dari desa tetangga.

Demikian juga Peusujuk. Meskipun gerak gerik ritual tersebut mungkin masih sama seperti yang dilakukan oleh umat Hindu, namun doa yang dipanjatkan dan tempat meminta pemberkatan berubah. Kalau umat Hindu meminta kepada selain Allah, maka tepung tawar pada masyarakat Gayo yang muslim meminta pemberkatan kepada Allah. Yang terpenting, menurut ingatan responden, adalah apa dan kepada siapa kita meminta. Bukan tentang bagaimana kita memintanya; apakah seperti gerakan umat Hindu atau bukan.

Banyak responden yang ditanya tentang kejadian ini menceritakan proses yang sama. Mereka menggambarkan Damanhuri sebagai orang yang lebih dalam ilmunya daripada Tengku Abdul Jalil. Pada perdebatan tersebut, Dia hanya membawa buku catatannya saja. Sementara Abdul Jalil membawa seluruh koleksi bukunya di atas punggung seekor kuda. Ada yang menyebutkan bahwa diperlukan dua ekor kuda untuk membawa buku-bukunya ke gelanggang perdebatan. Setiap kali Abdul Jalil diminta menjelaskan sesuatu tentang perihal yang diperdebatkan, dia selalu membuka salah satu buku. Sehingga penonton perlu menunggu beberapa saat untuk mendengar jawaban dari Abdul Jalil. Sedangkan Damanhuri dapat menjawabnya dengan mudah, lugas, dan cepat. Terkadang dia membuka buku catatannya untuk mendapatkan kepastian dan keakuratan. Tentu saja peristiwa ini bisa diinterpretasikan bermacam-macam, selain hanya membandingkan tingkat penguasaan teks masing-masing ulama tersebut. Misalnya, Abdul Jalil Sepertinya sangat berhati-hati dalam memberikan jawaban.

Penekanan pada pentingnya pemahaman, kerap mengesampingkan pentingnya menghafal terhadap teks. Sementara, barangkali, Damanhuri memiliki ingatan yang lebih kuat tentang materi yang telah dia baca. Lagi pula, hal yang lumrah pada muslim tradisional, dimana mereka menekankan pentingnya menguasai materi dengan cara menghafal baru kemudian dilanjutkan dengan pemahaman yang utuh dan komprehensif.

Dalam ingatan (alm) Ali Jadun, mantan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah, Bupati Banta Beni pernah menyampaikan bahwa kedua ulama tersebut memiliki karakter yang jauh berbeda. Abdul Jalil adalah seorang ulama yang lebih muda daripada Tengku Damanhuri, orator ulung tanpa tanding di masanya, tegas, dan memiliki jiwa aktivisme yang kuat. Sedangkan Damanhuri adalah sebaliknya. Seseorang yang sangat kalem, selalu berjalan dengan kepala menunduk, murah senyum dan seorang guru yang hebat. Bila ingin melihat karakter ulama yang menyejukkan, dalam ingatan Ali Jadun dari penuturan Banta Beni, maka kita harus melihat Tengku Damanhuri. Sedangkan bila ingin melihat ulama yang mengerakkan dan penuh semangat, sosok Tengku Abdul Jalil adalah contoh yang paling baik.

Masih menurut penuturan Banta Beni ke Ali Jadun, meskipun karakter mereka saling bertolak belakang, sebenarnya mereka tidak berposisi satu terhadap lainnya. Melainkan mereka seperti saudara yang diikat oleh misi dan cita-cita keislaman yang sama. Ketika Damanhuri wafat pada awal tahun 1940-an, tidak ada orang yang lebih merasa kehilangan selain Abdul Jalil. Dia menangis sedih sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil. Dengan karakternya yang tegas dan keras, Banta Beni tidak pernah melihat Abdul Jalil menangis selain pada saat kematian Tengku Damanhuri. Itu adalah kali pertama orang melihat sosok yang pemberontak dalam diri Abdul Jalil menangis.

Perdebatan kedua ulama tersebut tidak menghasilkan seorang pemenang pun. Barangkali, para juri sengaja melakukannya agar penonton belajar dan menilai penjelasan dari kedua ulama itu. Walaupun di antara kedua ulama besar pada masa itu tidak berposisi satu terhadap lainnya, perdebatan keduanya ternyata kemudian membawa perpecahan sosial keagamaan yang dalam dan tajam dalam masyarakat Gayo. Masyarakat Gayo terseret ke dalam perpecahan dua kelompok tersebut; *kom tue* yang tradisional dan *kaum mude* yang modernis. Bahkan, menurut Ibu Ramli, warga desa Jongok Bathin yang paling sepuh dan merupakan murid langsung dari Damanhuri, setelah perdebatan tersebut dia sering mendengar kesepakatan warga tentang tidak diperbolehkannya bergabung dua imam dari dua kelompok yang berbeda tersebut dalam satu masjid. Satu masjid hanya bisa diisi oleh satu jenis pemahaman, baik *tue* atau *mude*. Masing-masing kelompok bahkan melarang kelompok lain untuk memberikan ceramah keagamaan seperti ceramah Ramadhan di masjid kelompok lainnya.

Perbedaan ini sangat kentara terjadi di Desa Jongok. Pada tahun 2002, desa ini dipecah menjadi Desa Jongok Bathin dan Jongok Meluem. Warga Jongok Bathin adalah pengikut dari Tengku Damanhuri, yang juga berasal dan menetap hingga wafat di desa

itu dan mendirikan sekolahnya disana. Sekolah itu kemudian dikenal dengan doyah Mersah (meunasah) Batu. Warga Desa Jongkok Meluem merupakan pengikut dari kelompok Abdul Jalil dan Muhammadiyah. Mereka suka membawakan sya'er setiap waktu sebelum salat magrib. Muatan sya'er semakin lama semakin memperkeruh hubungan sosial keagamaan masyarakat desa Jongkok.

Menurut ingatan Ibu Ramli, kelompok *kom mude* sering sekali melewati batas dalam bersya'er. Mereka kerap mengolok-olok *kom tue* sebagai kelompok bid'ah. Para ulama *kom tue* mengkritik kegemaran baru *kom mude*. Mereka bahkan mengkritik lantunan sya'er sebelum azan magrib. Sebaiknya, menurut mereka, lebih baik melantunkan ayat suci alquran sebelum azan magrib berkumandang. Karena perbedaan semakin tajam, dan seruan tidak boleh ada dua imam dari satu masjid, warga Jongkok Bathin kemudian mendirikan mushalla dan masjid mereka sendiri. Desa ini adalah satu-satunya desa yang memiliki dua musala dalam satu desa yang berjarak 100 meter satu dengan lainnya.

Menurut Syin Junaidi, Kepada Desa Jongkok Bathin pertama, akibat dari perbedaan pemahaman agama dulu, masyarakat di desanya enggan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan kelompok lainnya. Masing-masing datang bersikap layaknya tamu. Padahal menurut adat kebiasaan, karena mereka berada di bawah administrasi kepemimpinan yang sama, mereka harusnya bersikap seperti tuan rumah. Demikian juga sebaliknya dengan belah Jongkok Meluem. Mereka juga enggan berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial dan ritual siklus kehidupan (kelahiran, pernikahan dan kematian). Karena dalamnya perbedaan agama merasuk sendi kehidupan masyarakat desa Jongkok, warga *belah* Jongkok Bathin, dipimpin oleh Junaidi, mengambil peluang pemekaran desa pada tahun 2012. Sekarang Jongkok Bathin adalah sebuah desa baru yang terpisah dari Jongkok Muluem.

## 5. Pasca Kemerdekaan: Peran Pemerintah dalam Pembaharuan Islam

Masa penjajahan Jepang dianggap sebagai masa kelabu bagi adat. Awalnya, tentara Jepang dipandang sebagai penyelamat masyarakat Gayo dan Aceh pada umumnya dari penjajahan Belanda. Namun, tidak lama berselang, Jepang menunjukkan kekejaman yang lebih buruk daripada Belanda. Misalnya, mereka memperkosa perempuan lokal untuk memberikan tekanan psikologis terhadap masyarakat Gayo. Mereka bahkan melecehkan adat dan budaya lebih buruk daripada perbuatan Belanda. Mereka mandi tanpa busana, memaksa menonton Sumo, dan memaksa pemuda untuk menghadap matahari setiap pagi. Menurut Pinan, jaman penjajahan Jepang adalah jaman kegelapan bagi adat.<sup>48</sup>

Walau begitu, bagi beberapa orang terutama bagi kelompok Ulama dan nasionalis, keadaan itu adalah momen penting untuk menggantikan adat atau budaya yang sudah

---

<sup>48</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 102-5; A.R Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanah Gayo*, ed. oleh Nasaruddin dan Aqli H (Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003).

ada dengan yang Islami. Meskipun tidak ada standar tentang apa yang dimaksud dengan adat atau budaya Islami tersebut. Untuk tujuan itu, ulama dari *kom tue* dan *kom mude* mulai mengesampingkan perbedaan antara mereka. Mereka membangun cita-cita yang sama untuk membentuk masyarakat muslim Gayo yang modern dan islami. Mereka sepakat bahwa adat harus digantikan. Kelompok nasionalis, yang dipimpin oleh Abdul Wahab - dia kemudian menjadi bupati pertama Aceh Tengah - yang mulai muncul pada tahun 1945 juga memiliki pandangan yang sama bahwa adat merupakan penghambat untuk kemajuan Gayo. Dalam pandangan kelompok nasionalis, adat Gayo sudah ketinggalan zaman dan merupakan bagian yang melekat pada elit-elit Gayo yang dekat dengan Belanda. Sama seperti ulama-ulama dari *kom tue* dan *mude*, kelompok nasionalis juga berpandangan adat lama masyarakat Gayo harus dihilangkan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat dalam bingkai negara republik baru, Indonesia. Sebagai persiapan untuk menjadi bagian dari negara baru, kelompok nasionalis bahkan kemudian memperkenalkan musik orkestra, drama, dan opera. Pada tahun 1946, Abdul Jalil bahkan secara terbuka menolak seluruh adat untuk dipraktikkan. Demikian juga Abdul Wahab dan rekan nasionalisnya, Mude Sedang, mengasosiasikan pendukung adat sebagai pendukung Belanda dan bertentangan dengan ide pemerintahan republik baru.<sup>49</sup>

Sebagian pemimpin desa menerjemahkan secara berbeda-beda seruan dari tokoh agama dan nasionalis tentang menyingkirkan praktik adat dan mengantikannya dengan budaya islami. Tetapi, beberapa desa lainnya tidak mendukung sepenuhnya seruan tersebut. Misalnya, ketika beberapa elit lokal, seperti Saleh Adry yang merupakan salah satu tokoh penting dalam kelompok tradisional, mencoba menghapuskan perkawinan endogami karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengizinkan praktik tersebut. Para tokoh desa menentang seruan tersebut dan mengatakan bahwa penghapusan pernikahan endogami sama dengan mengizinkan terjadinya perzinahan. Di lain kesempatan, Saleh Adry berkampanye ke seluruh desa dan menyerukan akan berakhirnya adat. Seruannya mendapatkan respons kuat dari tokoh-tokoh desa. Mereka memprotes "apakah kami akan menjadi seperti kambing, yang bebas berkeliaran tanpa panduan [adat]". Sebagai protes terhadap seruan tersebut, beberapa pimpinan desa meninggalkan desa yang memicu perpecahan di dalam desa dan pengosongan desa. seruan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Abdul Wahab karena khawatir mendapatkan perlawanan besar dari tokoh adat.<sup>50</sup>

Meski *kom tue* dan *mude* se-ide tentang pembentukan masyarakat islami yang modern, perbedaan mereka kembali menajam ketika gerakan Darul Islam meletus pada tahun 1953-1959. Dalam ingatan Ali Jadun, yang saya wawancara pada tahun 2015, perpecahan kembali antara ulama Gayo dipicu karena permasalahan perpolitikan.

<sup>49</sup> Bowen, *Sumatran Politics and Poetics*, 111.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 112.



Namun, itu tidak berdampak pada cita-cita mereka membangun masyarakat Gayo yang islami dan modern. Perpecahan politik tersebut, menurut ingatan Ali Jadun terjadi pada masa gerakan Darul Islam. Mayoritas ulama yang ikut bergerilya dengan gerakan Darul Islam berasal dari kelompok *kom tue*. Sedangkan kelompok *kom mude* dan para imigran seperti dari Minangkabau tidak ikut. *Kom Tue* mengancam tindakan kelompok ulama dan guru agama dari *kom mude* dan menyebut mereka sebagai kelompok pengecut.

Setelah berakhirnya perang, kelompok *kom tue* secara terang-terang mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap *kom mude*. Ali Jadun sendiri pernah mengalaminya setelah berakhirnya gerakan Darul Islam. Suatu hari dia berpapasan dengan kelompok *kom tue* yang ikut bergerilya. Dia menyapa mereka dengan senang bahagia karena sudah lama tidak pernah bertemu. Namun, sekelompok *kom tue* tersebut memalingkan muka mereka dan berlalu begitu saja seperti berpura-pura tidak melihatnya. Ali Jadun terheran akan perubahan sikap tersebut. Setelah mengamati beberapa peristiwa yang sama, dia kemudian sadar bahwa ada perpecahan di antara ulama di Gayo. padahal, menurut Ali Jadun, mereka yang tak ikut berperang, juga ikut “peperangan” lainnya di kota. Mereka mengajar dan berdakwah dan melakukan semua hal yang ditinggalkan oleh para ulama yang bergerilya.

Untuk mengantisipasi perpecahan yang semakin menajam, Ali Jadun dan Ali Salwany mengusulkan kepada Abdul Wahab, Bupati Aceh Tengah saat itu, untuk mendirikan organisasi ulama di Gayo. Tujuannya agar ulama *kom mude* dan *kom tue* sering berjumpa di satu gedung tertentu. Dengan demikian, secara perlahan komunikasi mereka akan terjalin kembali dan dapat menghilangkan kecurigaan dan perbedaan. Abdul Wahab sepakat dengan usulan tersebut dan kemudian mendirikan organisasi ulama yang bernama Persatuan Alim Ulama Kewedanan Takengon (PAUKT).<sup>51</sup> Menurut Ali Jadun, mereka menginginkan ada unsur pimpinan dari *kom tue*. Namun, Ulama *kom tue* menolak bergabung. Meski beberapa surat undangan telah dikirimkan, tetap tidak ada perwakilan dari pihak mereka yang datang. Sehingga, unsur pimpinan PAUKT dihuni oleh kelompok *kom mude*. Mereka adalah Ali Jadun, Ali Salwany dan Abdul Jalil.

Menurut Ali Jadun, PAUKT, yang berdiri pada tahun 1962, adalah organisasi ulama pertama di Indonesia. Pada tahun 1969, Ali Hasymy, Gubernur Aceh pertama, mengundang pimpinan PAUKT ke Kutaraja, Banda Aceh saat ini, beserta semua ulama dari seluruh Aceh untuk pembentukan organisasi ulama Aceh. Ali Jadun, mewakili PAUKT, menghadiri rapat besar tersebut. Dia menjelaskan kepada Hasymy bahwa mereka telah memiliki organisasi ulama sejak tahun 1962. Dia menawarkan PAUKT untuk dimasukkan ke dalam bagian organisasi ulama yang akan dibentuk itu. Organisasi

---

<sup>51</sup> Mahmud Ibrahim, “Ulama Aceh Tengah Menunjang Pembangunan: Kajian Dewan Paripurna Ulama Bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2004 s/d 2012” (Unpublished, 2013).

kesepakatan para ulama Aceh itu kemudian dibentuk secara resmi pada tahun berikutnya, 1970, dan menginspirasi pembentukan organisasi ulama Indonesia yang kini bernama Majelis Ulama Indonesia.

Setelah kemerdekaan, islamisasi budaya terjadi melalui proses pendidikan dan dakwah. Sekolah Persatuan Islam yang didirikan oleh Abdul Jalil melahirkan ulama-ulama modernis yang menyerukan pembaharuan Islam. Ulama-ulama tersebut seperti Ali Wari, yang kemudian menjadi Dosen di IAIN Ar-Raniry dan anggota MPU Aceh.

Ulama terkemuka lainnya adalah Abdul Jalil Bahagia. Dia meneruskan Pendidikan Islam setelah gurunya, Abdul Jalil wafat. Dia mendirikan Pesantren bernama Al Falah di Desa Hakim, dimana Pendidikan Islam awalnya berdiri. Penelitian ini menemukan banyak hasil karyanya berupa saduran tata bahasa arab (Nahwu dan Ilmu Sharaf), khotbah, tafsir-tafsir pendek dan lainnya. Dari koleksi perpustakaan, yang kini dipindahkan ke perpustakaan STAIN Gajah Puteh, terlihat bahwa dia memiliki jaringan nasional yang cukup luas. Dia mendapatkan buku-buku dari Persis dan Gontor dan juga, secara rutin, dia mendapatkan berbagai majalah nasional seperti majalah Hikmah, Santuan, dan Kiblat. Dari catatannya, dia menekankan akan pentingnya mempelajari bahasa Arab sebagai alat satu-satunya untuk memahami Al-Quran. Tanpa mempelajari Bahasa Arab, seseorang tidak akan paham Al-Quran. Sehingga dia tidak akan paham Islam. Sayang, Pesantren ini tidak bertahan hingga sekarang. Namun, alumninya tersebar hingga ke Sulawesi.

Sedangkan kelompok *kom tue*, setelah wafatnya Tengku Damanhuri, untuk beberapa saat tidak terlalu fokus pada pendidikan agama. Hal ini karena mayoritas mereka terlibat dalam gerakan Darul Islam. Hingga perang itu usai, baru kemudian berdiri sebuah pesantren yang kemudian dikenal dengan Pesantren Pasir, yang terletak di Desa Mendale, Kebayakan. Alumni dari pesantren ini bertebaran ke pelosok desa-desa dan juga luar daerah. Mereka menjadi tokoh agama di tempat tinggal baru mereka dan mendirikan pengajian kitab kuning untuk para penduduk desa.

Menurut semua responden yang diwawancarai, semenjak kemerdekaan, tidak ada lagi perdebatan agama antara kelompok *kom tue* dengan *kom mude*. Mereka sama-sama berpikir untuk menjadikan masyarakat Gayo yang islamis. Meski jalan mereka berbeda, namun objek yang mereka usahakan rubah adalah sama, yaitu adat.

Perlu diingat juga bahwa Damanhuri, Saleh Adri, Abdul Jalil, dan Abdul Wahab, serta termasuk juga Ilyas Leubee yang merupakan pimpinan tertinggi gerakan Darul Islam di Gayo, adalah tokoh Gayo terakhir yang disegani dan dihormati oleh mayoritas orang Gayo. Setelah tokoh ini wafat satu persatu, yang terakhir adalah Abdul Jalil yang wafat pada tahun 1970an, tidak ada lagi tokoh Gayo yang memiliki pengaruh yang sama kuatnya. Sehingga proses islamisasi tidak memiliki generasi.

Ulama-ulama berikutnya, seperti (alm) Ali Jadun (wafat 2016) dan (alm) Mahmud Ibrahim (wafat 2017) tidak terlalu mendominasi Gayo. Bahkan beberapa responden penelitian ini tidak menyukai kedua tokoh tersebut karena dianggap terlalu dekat

bahkan menjadi bagian dari pemerintah. Sehingga mereka cenderung menjadi pembela pemerintah dan melupakan kepentingan masyarakat. Tentu saja, banyak orang Gayo yang memiliki kualitas ulama, seperti Abdul Jalil Basiq (putra Abdul Jalil Bahagia), Prof. Alyasa Abubakar, Prof. Baihaqi dan lainnya. Namun, mereka menetap dan memberikan pengaruh di daerah lain sehingga tidak memberikan warna keislaman di Gayo.

Karena alasan itulah, Mahmud Ibrahim, yang sempat saya wawancarai pada tahun 2015, mengatakan dia sengaja mencari justifikasi alquran dan sunah untuk mendukung praktik-praktik adat. Karena masyarakat Gayo lebih sering mempelajari dan mempraktikkan adat, maka dengan memperbaiki adat, secara tidak langsung masyarakat Gayo akan mengikuti ajaran Islam. Untuk tujuan itu, dia menulis bersama A Pinan tiga volume buku tentang Syariah dan adat.<sup>52</sup>

Dalam ketiga buku yang ditulis oleh Mahmud Ibrahim tersebut, tergambar jelas bahwa adat budaya Gayo tidak berbeda sama sekali dengan ajaran Islam. Mahmud Ibrahim memberikan alasan-alasan teologis atau dukungan ayat Alquran dan Hadist tentang semua praktik tersebut. Keyakinannya dipertegas ketika ditanya tentang perkembangan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. dia mengatakan bahwa orang Gayo tidak memerlukan syariat Islam ala pemerintahan Aceh tersebut. Karena semuanya sudah ada di dalam adat Gayo. Misalnya, katanya, aturan tentang mesum dan zina sudah diatur oleh adat Gayo dalam aturan Sumang.

#### D. Penutup

Proses islamisasi budaya di daerah Gayo meningkat drastis setelah kedatangan Belanda yang membawa banyak orang dari daerah berbeda ke Gayo. Interaksi dan pertukaran budaya yang terjadi dan didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun Belanda membawa semakin banyak orang Gayo untuk belajar ke luar daerah seperti pesisir Aceh, Sumatra Barat dan Pulau Jawa. Sekembalinya ke Gayo, mereka terlibat intensif dalam proses islamisasi budaya setempat.

Perdebatan agama pada masa kolonial antar kom tue dan mude sepertinya menjadi pengalaman penting dalam perselisihan agama yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Gayo. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, ditambah dengan rekonsiliasi para ulama pasca penjajahan Jepang, tidak pernah terdengar lagi perdebatan sengit atau ujaran menyalahkan kelompok agama tertentu hingga saat. Sepertinya masyarakat Gayo kini memiliki kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan agama dan kesadaran akan dampak besar yang ditimbulkan bila perdebatan itu dipertajam.

---

<sup>52</sup> Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, 4 ed., vol. 2 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010); Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, 1 ed., vol. 1 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2002); Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, 1 ed., vol. 3 (Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2005).

Proses islamisasi budaya terus terjadi hingga pasca kemerdekaan. Ulama-ulama setempat mendirikan pesantren-pesantren menurut pemahaman agama mereka; tradisional dan modernis. Namun, ulama-ulama pembaharu saat itu tidak berhasil menemukan definisi dan praktik yang tepat untuk budaya islami yang mereka kampanyekan semenjak awal kemerdekaan. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya regenerasi ulama pembaharu yang menetap di Gayo. Keadaan ini membuat ulama-ulama disana kemudian memilih untuk mendukung praktik adat, alih-alih menghapuskannya seperti cita-cita ulama pada masa kolonial dan awal-awal kemerdekaan.

### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, dan Syamsul Rijal. *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2007.
- Abbas, Syahrizal, Syamsul Rijal, dan Bustami Abubakar. "Respon Masyarakat Bireun Terhadap Hukuman Cambuk." Dalam *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2007.
- Abdullah, Taufik. "Schools and Politics: The 'Kaum Muda' Movement in West Sumatra (1927-1933)." Cornell University, 1970. <http://search.proquest.com/docview/302519029/>.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- — —. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Abubakar, Al Yasa'. "Syari'at Islam dan Budaya Aceh Pedalaman - Lintas Gayo," 2012. <http://www.lintasgayo.com/28428/syariat-islam-dan-budaya-aceh-pedalaman.html>.
- Aceh Tengah, Pemda, dan PT. BPD Aceh Cabang Aceh Tengah. "Arsip Tanah Budi Luhur Takengon," 2009.
- Afrianty, Dina. "Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI." Dalam *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*, disunting oleh David Kloos, Annemarie Samuels, dan R. Michael Feener. Leiden: BRILL, 2015.
- Amal, Taufik Adnan. *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Cet. 1.. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Aspinall, Edward. "From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia." *Nations and Nationalism* 13, no. 2 (2007): 245-263. doi:10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x.
- Bälz, Kilian. "Shari'a and Qanun in Egyptian Law: A Systems Theory Approach to Legal Pluralism." *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online* 2, no. 1 (1995): 37-53. doi:10.1163/221129896X00037.
- Benda-Beckmann, Franz Von, dan Keebet Von Benda-Beckmann. "Decentralisation, the transformation of the nagari and the dynamics of legal pluralism." Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

- Berger, Maurits S. "The Shari'a and Legal Pluralism: The Example of Syria." Dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, disunting oleh Baudouin Dupret, M. S. Berger, dan Laila Al-Zwaini. Arab and Islamic Laws Series ; Vol. 18. 07926929X. The Hague [etc.]: Kluwer Law International, 1999.
- Bowen, John R. "A Modernist Muslim Poetic: Irony and Social Critique in Gayo Islamic Verse." *The Journal of Asian Studies* 52, no. 3 (1993): 629–646. doi:10.2307/2058857.
- — —. *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993.
- — —. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. New Haven, Conn, etc: Yale University Press, 1991.
- — —. "The History and Structure of Gayo Society: Variation and Change in the Highland of Aceh." ProQuest Dissertations Publishing, 1984. <http://search.proquest.com/docview/252106428/>.
- Dardanila, Dardanila. "Leksikostatistik Bahasa Karo dan Bahasa Gayo." Dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1:185–191, 2018.
- Dyen, Isidore. *A Lexicostatistical Classification of the Austronesian Languages*. Memoir of International Journal of American Linguistics; Memoir 19 851547273. Baltimore, Md.: Waverly Press, 1965.
- Elam, Yigal, dan Noa Gedi. "Collective Memory - What Is It?" *History and Memory* 8, no. 1 (1 April 1996): 30–50.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford Islamic Legal Studies 375521917. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.
- Husaini, Husda. "Sejarah Pemberlakuan Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." Dalam *Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, disunting oleh Fauzi Ismail dan Arifin M. Zain. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007.
- Ibrahim, Mahmud. "Ulama Aceh Tengah Menunjang Pembangunan: Kajian Dewan Paripurna Ulama Bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2004 s/d 2012." Unpublished, 2013.
- Ibrahim, Mahmud, dan A.R Hakim Aman Pinan. *Syari'at dan Adat Istiadat*. 1 ed. Vol. 1. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2002.
- — —. *Syari'at dan Adat Istiadat*. 1 ed. Vol. 3. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2005.
- — —. *Syari'at dan Adat Istiadat*. 4 ed. Vol. 2. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010.
- Jedlowski, Paolo. "Memory and Sociology: Theme and Issues." *Time and Society* 10, no. 1 (2001): 29–40.
- Jones, Russell. *Hikayat Raja Pasai*. Karya agung 303741295. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan: Fajar Bakti, 1999.
- Kamsin, Kamsin. "Rancangan kawasan pusat seni budaya Gayo di Kabupaten Gayo Lues Propinsi Aceh." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Kloos, David. *Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia*. Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018.

- — —. "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia." *Indonesia*, no. 98 (1 Oktober 2014): 59–90. doi:10.5728/indonesia.98.0059.
- Lintasgayo.co. "Berkunjung ke Situs Loyang Mendale, Dr. Ketut Jelaskan Objek Penelitian ke Pak Nas." *Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, 27 Maret 2017. <http://lintasgayo.co/2017/03/27/berkunjung-ke-situs-loyang-mendale-dr-ketut-jelaskan-objek-penelitian-ke-pak-nas>.
- lintasgayo.co. "Fakta di Ceruk Mendale (Seharusnya) Mengakhiri Polemik Uken-Toa." *News. Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, 28 Juni 2015. <http://lintasgayo.co/2015/06/28/fakta-di-ceruk-mendale-seharusnya-mengakhiri-polemik-uken-toa>.
- — —. "Politik Uken-Toa Muncul di Akar Rumput, Bukan di Perdu!" *News. Media Online Dataran Tinggi GAYO | lintasgayo.co*, 9 Januari 2015. <http://lintasgayo.co/2015/09/11/politik-uken-toa-muncul-di-akar-rumput-bukan-di-perdu>.
- Melalatoa, M. J. *Kebudayaan Gayo*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Naşr, Ḥusayn. *Ideals and Realities of Islam*. London [etc.]: Aquarian, 1994.
- — —. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. San Francisco, CA: HarperSanFrancisco, 2002.
- nurdin. "Provinsi Aceh Terdiri Dari 23 Kabupaten, 13 Suku Dan Memiliki 11 Bahasa." *Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh*, 30 Oktober 2019. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/provinsi-aceh-terdiri-dari-23-kabupaten-13-suku-dan-memiliki-11-bahasa-daerah/>.
- Nurdin, Abidin, Samsul Bahri, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dinas Syariat Islam. *Syariat Islam dan isu-isu kontemporer*. Ed. 1.. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- PaEni, Mukhlis. *Riak di laut tawar: kelanjutan tradisi dalam perubahan sosial di Gayo-Aceh Tengah*. Cet. 1.. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2003.
- Pinan, A.R Hakim Aman. "Pelestarian Budaya Tradisional Masyarakat Pendukungnya." Unpublished, 1997.
- — —. *Pesona Tanah Gayo*. Disunting oleh Nasaruddin dan Aqli H. Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003.
- Rismawati, Rismawati. "Tingkat Keterancaman dan Kepunahan Bahasa Gayo." *Metamorfosa Journal* 4, no. 2 (2016).
- Salihin, Ansar, Sulaiman Juned, dan Dharsono Dharsono. "Motif ukiran Kerawang Gayo pada Rumah Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh." *Gorga Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): 68–79.
- Salim, Arskal. "Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 42, no. 61 (1 Januari 2010): 1–29. doi:10.1080/07329113.2010.10756640.
- Snouck Hurgronje, C. *Tanah Gayo dan penduduknya*. Seri INIS; XXV. Jakarta: INIS, 1996.
- Srimulyani, Eka. "Islam, Adat, and the State: Matrilocality in Aceh Revisited." *Al-Jami'ah : Journal of Islamic Studies* 48, no. 2 (2010): 321–342. doi:10.14421/ajis.2010.482.321-342.

- Surip, Muhammad, dan Dwi Widayati. "Kekerabatan Bahasa Jawa dan Gayo: Kajian Linguistik Historis Komparatif." *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 11, no. 1 (2019): 1-26.
- Syukri. *Sarakopat: sistem pemerintahan Tanah Gayo dan relevansi terhadap pelaksanaan otonomi daerah*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Syukri, Syukri. "Budaya Sumang dan Implementasinya terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018): 406-27.
- Vollenhoven, C. van. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Volume I, 1918; Volume II, 1931)*. Disunting oleh J. F. Holleman. Diterjemahkan oleh J. F. Holleman, Rachel Kalis, dan Kenneth Maddock. Translation Series ; 20. 830293302. The Hague: Nijhoff, 1981.
- Wiradnyana, Ketut. *Gayo merangkai identitas*. Ed. 1.. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.